

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Modal yang terpenting menurut paham teori klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo dan Karl Marx, berpendapat bahwa salah satu sumber faktor produksi adalah kualitas sumberdaya manusia agar dapat menciptakan kemakmuran suatu negara dan untuk itu pemerintah dihimbau untuk fokus dalam perbaikan keduanya, terutama pada tahun 2040 akan mengalami bonus demografi. Sumber Daya Manusia diartikan sebagai potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tertentu baik secara kuantitas yang diukur dari banyaknya pertumbuhan angkatan kerja, sedangkan kualitas diukur dari pengembangan SDM. Tentu hal tersebut dapat menjabarkan betapa pentingnya Sumber Daya Manusia yang memerlukan perhatian khusus karena memegang peran yang penting untuk keberhasilan ekonomi di suatu daerah.

Daerah yang dapat memanfaatkan SDM nya secara maksimal dapat dilihat melalui angka *employment rate*, seperti misalnya DKI Jakarta yang menjadi pemerintahan pusat (memiliki kedudukan tertinggi karena semua kegiatan perekonomian dijalankan di DKI Jakarta) dan pusat perekonomian (sebagai penunjang bagi daerah lainnya karena dianggap potensial) sehingga patut diperdalam terutama terkait penyerapan tenaga kerja karena persoalan tersebut kerap dihadapi oleh setiap daerah mengenai tersedianya lapangan pekerjaan yang selanjutnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Berikut data pendukung yaitu Tabel 1 untuk menggambarkan perkembangan *employment rate* di DKI Jakarta Tahun 2015-2019.

Tabel 1. Perkembangan Employment Rate di DKI Jakarta
Tahun 2015-2019

Tahun	Bekerja (dalam satuan jiwa)	Angkatan Kerja (dalam satuan jiwa)	Employment Rate
2015	4.724.029	5.092.219	93%
2016	4.861.832	5.178.839	94%
2017	4.509.171	4.856.116	93%
2018	4.726.779	5.041.620	94%
2019	4.836.977	5.157.878	94%

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, data diolah

Jika melihat dari tabel 1, didapatkan hasil bahwa rasio tersebut sudah cukup baik karena memiliki rasio diatas 90% selama 5 tahun terakhir. Namun, tantangan yang dihadapi DKI Jakarta adalah banyaknya jumlah penduduk tentu menimbulkan konsekuensi seperti sulitnya memenuhi kebutuhan berdampingan dengan jumlah penduduk yg meningkat. Selain itu, jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar di DKI Jakarta belum tentu diisi dengan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi, dimana tolak ukurnya adalah pendidikan yang ditempuh karena kondisi kualitas tenaga kerja tentunya akan berimbas pada daya saing yang rendah dalam mendapatkan pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah guna mendukung tingkat pendidikan lebih tinggi adalah dengan adanya bantuan beasiswa yang diberikan, namun beberapa diantaranya memutuskan untuk lanjut bekerja. Hal ini didukung oleh rasio lulusan SMA/SMK dan yang sudah bekerja di DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. Rasio Lulusan SMA/SMK dan Rasio Lulusan SMA/SMK
yang bekerja

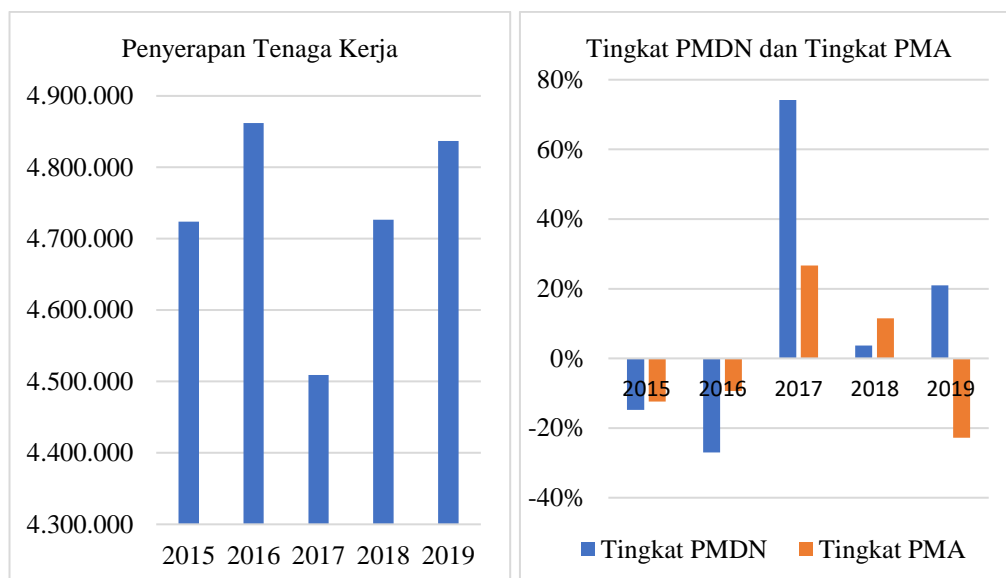
Tahun	Rasio Lulusan SMA/SMK	Rasio Lulusan SMA/SMK yang bekerja
2015	63,99%	39,26%
2016	62,89%	40,09%
2017	113,39%	40,19%
2018	66,40%	39,65%
2019	68,87%	43,45%

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, data diolah

Catatan: Rasio lulusan SMA/SMK adalah rasio antara lulusan SMA/SMK dengan angkatan kerja. Rasio lulusan SMA/SMK yang bekerja adalah rasio antara lulusan SMA/SMK yang bekerja dengan angkatan kerja

Berdasarkan tabel 2 diatas, temuan yang menarik terdapat kenaikan yang signifikan pada tahun 2017, dikarenakan pada tahun tersebut banyak lulusan SMA/SMK yang beralih pada kegiatan bersekolah ataupun melaksanakan kegiatan lainnya sehingga memutuskan untuk tidak bekerja sehingga hal ini berpengaruh terhadap rasio lulusan SMA/SMK yang bekerja. Sedangkan untuk rasio lulusan SMA/SMK yang bekerja dapat dikatakan memiliki presentase hampir setengahnya dalam pasar tenaga kerja, sehingga hal ini justru bertolak belakang dengan pendidikan sebagai sarana para tenaga kerja dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan, sebagaimana tercermin dari teori yang dikemukakan oleh Romer bahwa peningkatan ide yang diperoleh melalui pendidikan akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan.

Guna mendukung terserapnya tenaga kerja, dibutuhkan investasi yang masuk ke suatu daerah, yang nantinya dapat membantu tenaga kerja karena penciptaan lapangan usaha baru sehingga dapat meningkatkan permodalan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah adanya aturan mengenai penggunaan tenaga kerja. Berdasarkan narasi tersebut, seharusnya investasi meningkat berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Terlampir dibawah ini gambar 1, mengenai perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja dan tingkat PMDN & PMA di DKI Jakarta 5 tahun terakhir.



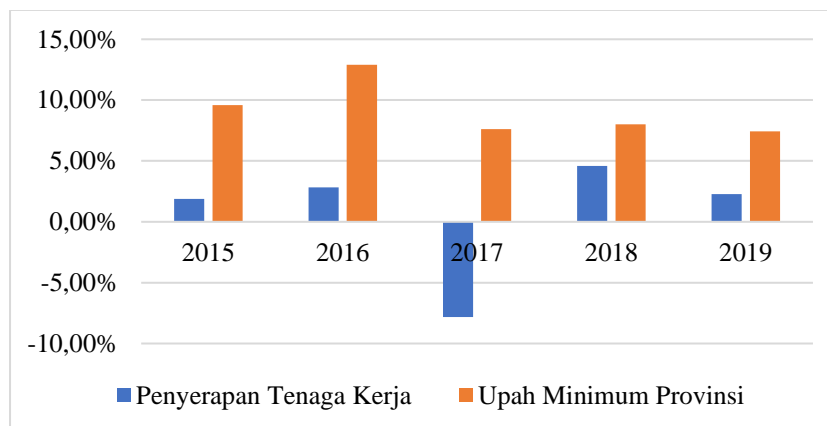
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik
DKI Jakarta, Data diolah

Gambar 1. Grafik Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja (kiri, dalam ribu jiwa) dan Tingkat PMDN & PMA (kanan, dalam presentase) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Terlihat pada gambar 1, terjadi kenaikan dan penurunan laju investasi baik asing maupun domestik begitu pula halnya dengan penyerapan tenaga kerja. Terdapat *gap* dimana pada tahun 2017, saat investasi realisasinya sangat meningkat namun justru penyerapan tenaga kerja berada pada poin terendah selama 5 tahun terakhir, dimana seharusnya dengan adanya permodalan yang masuk dapat mempermudah untuk penyerapan tenaga kerja dan penambahan ilmu pengetahuan baik bersifat *soft skill* maupun *hard skill* bagi para pekerja selain menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun yang terjadi adalah kegiatan investasi tersebut nyatanya berfokuskan pada padat modal (penggunaan mesin) dibandingkan padat karya (penggunaan tenaga kerja manusia).

Dengan peningkatan upah yang diterima jika tenaga kerja memiliki pengetahuan atau *skill* yang memadai, tentu nantinya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar balas jasa yang diterima tenaga kerja pun meningkat. Dalam hal ini DKI Jakarta kerap berupaya meningkatkan Upah

Minimum Provinsi. Terlampir dibawah ini perkembangan penyerapan tenaga kerja dan upah DKI Jakarta 5 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Data diolah

Catatan: Penyerapan Tenaga Kerja adalah banyaknya angkatan kerja yang bekerja

Gambar 2. Grafik Perkembangan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 2 dapat terlihat bahwa dengan peningkatan upah minimum tidak selalu berdampingan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, karena upah minimum kian meningkat setiap tahunnya, namun penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami kenaikan atau penurunan. Menurut teori ekonomi yang dikemukakan Romer, meskipun upah kian meningkat belum tentu dapat meningkatkan penyerapan karena faktor lainnya disebabkan tingkat upah yang ditetapkan di suatu daerah serta bergantung pada ide dari tenaga kerja.

Beberapa penelitian mencoba melihat pengaruh Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja, Tingkat Investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri serta Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, dengan memfokuskan hubungan variabel-variabel tersebut dengan terserapnya tenaga kerja. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah yang dilakukan oleh Nofandillah Arumsyah Putri dan Aris Soelistyo (2018), Dirta Pratama Atiyatna, Nurlina T. Muhyiddin dan Bambang Bemby Soebyakto (2016), Muhammad Hidayat dan Nurlela (2018), Martini (2016) serta Rieky Hermawan, Lucia Rita Indrawati dan Sudati Nur

Sarfiah (2019). Menyatakan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Penyerapan Tenaga Kerja.

Dari uraian diatas, maka diperlukan rekomendasi atau gagasan yang dapat membantu dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Oleh karena itu, hal ini melatarbelakangi penelitian dengan judul “Penyerapan Tenaga Kerja Di Wilayah DKI Jakarta Pada Tahun 1990-2019”.

I.2 Perumusan Masalah

Terserapnya tenaga kerja di DKI Jakarta jika diukur melalui *employment rate* sudah memiliki rasio yang cukup baik dimana angka pertumbuhannya sudah melebihi 90% dalam 5 tahun terakhir, namun yang masih menjadi persoalan dikarenakan kualitas yang rendah jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ada. Tingkat investasi baik asing maupun domestik masih belum secara optimal menyerap tenaga kerja karena berfokus pada padat modal dibandingkan padat karya dimana penggunaan mesin-mesin lebih diutamakan daripada tenaga kerja manusia. Serta upah yang kian meningkat setiap tahunnya seharusnya memberikan dampak positif tetapi dapat dianggap beban oleh perusahaan. Sehingga timbul perumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta?
- b. Bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta?
- c. Bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta?
- d. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, timbulah tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan mengenai implikasi Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta.
 - 2) Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan pengetahuan tentang dampak Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan di dalam sektor Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Provinsi.
 - 2) Untuk mendeskripsikan pengaruh Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta.